

KAJIAN IDENTIFIKASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI PAPUA BARAT

Entis Sutisna dan Erni Rossanti Maruapey

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat

Entis007@yahoo.com

ABSTRAK

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu program aksi yang dapat mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian. Program ini bersentuhan langsung dengan petani sebagai unsur terdepan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Sasaran utama dari pelaksanaan penyuluhan tersebut lebih menitik beratkan pada bagaimana merubah pola pikir petani agar mau menerapkan inovasi baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. Terjadinya perubahan-perubahan pada tataran pemerintahan baik pusat maupun daerah mengakibatkan kelembagaan penyuluhan pertanian mengalami disorganisasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat korps penyuluhan pertanian adalah aset yang sangat berharga dari dunia pertanian Indonesia sesudah petani. Salah satu pintu masuk untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan adanya tindakan mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan penyuluhan. Kajian ini dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Sorong periode Juni – September 2014. Tujuan pengkajian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi/saran perbaikan berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan pertanian di provinsi Papua Barat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem penyuluhan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat saat ini masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kelima variabel pendukung terlaksananya sistem penyuluhan yaitu keberadaan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan tugas setiap lembaga, ketersediaan penyulu, ketersediaan dan pelaksanaan program penyuluhan, dukungan fasilitas dan peralatan, sesuai hasil indentifikasi. Direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten Kota agar membentuk kelembagaan penyuluh sampai pada tingkat kecamatan, dan perlu melakukan perubahan/perbaikan dalam berbagai tahapan, meliputi: struktur kelembagaan, program, sumberdaya, dan pelaksanaan penyuluhan itu sendiri.

Kata Kunci: Penyuluhan pertanian, identifikasi, evaluasi

PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan pertanian di Provinsi Papua Barat di arahkan pada kebijakan yang didukung dengan strategi dan implementasi program yang berlandaskan pada empat vocal poin yakni peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan wilayah serta investasi daerah. Hal ini berlandaskan pada RPJM Nasional, dan RPMJ 2011 – 2016 Pemerintah Provinsi Papua Barat. Tujuan Utama dari percepatan pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan pola usahatani komersial berbasis sumberdaya lokal, menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan kesejahteraan petani (Bappeda Prov. Papua Barat, 2011).

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam RPJM Papua Barat tersebut, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, termasuk menyediakan kelengkapan untuk terlaksananya pelaksanaan sistem penyuluhan secara efektif dan efisien.

Pengertian penyuluhan sebagai mana tertuang dalam UU No.16 tahun 2006 adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan itu, penyuluhan pertanian merupakan salah satu program aksi yang dapat mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian. Program ini bersentuhan langsung dengan petani sebagai unsur terdepan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Sasaran utama dari pelaksanaan penyuluhan tersebut lebih menitik beratkan pada bagaimana merubah pola pikir petani agar mau menerapkan inovasi baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya.

Reformasi dan Otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai aspek, diantaranya urusan pemerintahan, kelembagaan, dinas-dinas, peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk pada ranah penyuluhan pertanian itu sendiri. Pada hakikatnya Reformasi telah mengubah suasana otokrasi menjadi demokrasi, yang dalam prakteknya menampilkan kebebasan berfikir, berbicara, dan bertindak. Kalau dulu sudah terbiasa "seragam", sekarang orang lebih suka menonjolkan perbedaan. Artinya keseragaman sudah berubah menjadi keragaman.

Perubahan yang tak kalah penting artinya ialah perubahan kebijaksanaan pemerintah tentang pembangunan pertanian dan tentang Penyuluhan Pertanian itu sendiri. Melalui otonomi daerah terjadi pengalihan tanggung-jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan pertanian dan program-program pertanian yang bersifat "seragam nasional" di masa lalu, telah diubah menjadi yang bersifat spesifik lokal. Ini terbukti dengan telah dibentuknya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah, dimana fungsi penelitian dan penyuluhan akan diintegrasikan (Slamet, 2006).

Meskipun perubahan-perubahan itu pada umumnya terjadi di semua daerah, namun haruslah diakui bahwa tingkat perubahan dan kemajuan yang dialami tidak merata disemua daerah. Ada daerah-daerah yang sudah lebih maju dari daerah lainnya, demikian pula ada daerah-daerah yang belum begitu maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Yunus Jarmi (1994) mengidentifikasi adanya 3 kategori wilayah pertanian yang berbeda nyata tingkat kemajuannya. Perbedaan-perbedaan itu menyangkut prasarana fisik, produktifitas pertaniannya, serta tingkat kemajuan petani-petaniannya. Tiga kategori wilayah pertanian itu adalah : (1) Wilayah yang prasarananya relatif memadai (karena telah dibangun sejak jaman penjajahan), teknologi yang diterapkan sudah maju secara mantap, produktivitas tinggi, berorientasi pada pasar, dan (karenanya) para petani telah membutuhkan dan mencari secara aktif informasi-informasi pertanian. (2) Wilayah yang prasarananya baru dibangun tetapi belum memadai, mulai mengenal dan menerapkan teknologi maju tetapi belum mantap, produktivitas sedang, belum berorientasi ke pasar, dan belum aktif mencari informasi pertanian. (3) Wilayah yang relatif belum memiliki prasarana-prasarana pertanian, teknologi tradisional masih mendominasi, produktivitas rendah, petani masih tradisional dan pertaniannya masih bersifat subsisten, belum merasa memerlukan informasi pertanian.

Variabel-variabel pembeda dari tingkat kemajuan suatu wilayah seperti tertuang di atas, antara lain: Sarana, dan prasarana pertanian, tingkat penerapan teknologi, dan orientasi produksi. Ini semuanya banyak ditentukan oleh kebijakan pelaksanaan sistem penyuluhan di setiap daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa, penerapan sistem penyuluhan yang baik di suatu daerah dapat menjadikan daerah itu semakin maju.

Berdasarkan fenomena di atas maka pelaksanaan penyuluhan pertanian di Provinsi Papua Barat menjadi sangat menarik untuk dikaji mengingat provinsi Papua Barat termasuk salah satu provinsi baru, dan termasuk kriteria katagori 3 berdasarkan hasil identifikasi perbedaan kondisi daerah seperti di atas. Pertanyaan yang cukup menarik adalah "sejauh mana provinsi Papua Barat dapat melaksanakan sistem penyuluhan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian yang telah dicanangkan di propinsi ini. Sejalan dengan itu, tujuan pengkajian diarahkan untuk melakukan identifikasi, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penyuluhan di Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini Telah dilaksanakan tahun 2014, lokus kegiatan meliputi 3 kabupaten yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Sorong, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus yang bersifat multi metode. Titik berat kajian ini pada metode-metode non survai yang meliputi pengamatan lapangan, wawancara mendalam dengan responden kasus, wawancara dengan informan kunci, diskusi kelompok dan kajian dokumen (data sekunder) (Sitorus, *et al*/2004).

Metode-metode non-survei dipergunakan untuk mendapatkan "uraian mendalam" (*thick description*) mengenai pelaksanaan sistem penyuluhan terutama mengenai struktur dan dinamika

organisasi hubungan-hubungan dalam kegiatan proses adopsi teknologi sebagai hasil kegiatan penyuluhan, termasuk dinamika kegiatan penyuluh itu sendiri. Kegiatan penelitian non – survai ini dilakukan melalui suatu seri kunjungan lapangan ke lokasi pengkajian dalam periode Juni - Agustus 2014. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah subyek tineliti yang terdiri dari berbagai pelaku (*stakeholder* dan *beneficiaris*) Selain metode non-survei, secara terbatas (sesuai kebutuhan), akan diterapkan juga metode survei berupa "survei kecil" untuk mendapatkan gambaran dasar tentang tanggapan petani terhadap pelaksanaan sistem penyuluhan, maupun terhadap peran lembaga – lembaga penyuluhan. Jumlah sampel sebanyak 30 kk per desa, yang ditentukan berdasarkan metode acak berstrata.

Analisis Data

Dari seluruh data yang diperoleh, akan dianalisis menurut prosedur standar. Terhadap data kualitatif, akan dilakukan peringkasan, penggolongan, penelusuran tema dan pengaitan antar tema. Sedangkan data kuantitatif primer, karena ukuran sampelnya kecil, akan diolah secara manual, selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk-bentuk tabel frekuensi, dan tabel silang sederhana. Terhadap data kuantitatif sekunder, akan dilakukan pengolahan ulang dan tabulasi ulang. Kedua gugus data tersebut, yaitu data kualitatif dan kuantitatif, saling melengkapi satu sama lain dalam upaya menjawab tujuan pengkajian ini.

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu mengidentifikasi pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat mengacu pada pemahaman istilah Identifikasi menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2016 dan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: "Identifikasi berasal dari kata *Identify* yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari "kebutuhan" lapangan (. Berkaitan dengan program pembangunan, fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) identifikasi/iden·ti·fi·ka·si/ /idéntifikasi/ *n* 1 tanda kenal diri; bukti diri; 2 penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya; 3 *Psi* proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang karena secara tidak sadar dia membayangkan dirinya seperti orang lain yang dikaguminya, lalu dia meniru tingkah laku orang yang dikaguminya itu; mengidentifikasi/meng·i·den·ti·fi·ka·si/ *v* menentukan atau menetapkan identitas (orang, benda, dan sebagainya): sedangkan variabel-variabel yang diidentifikasi berkaitan dengan keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian mulai tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan, pelaksanaan tugas utama setiap lembaga penyuluhan pertanian, programa penyuluhan, ketersediaan sumberdaya penyuluh, dan pelaksanaan penyuluhan oleh penyuluh lapangan.

Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu mengevaluai pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat mengacu pada Pengertian Evaluasi menurut pendapat Curtis et al. (1996); dan Duncan, (2005): "Evaluasi (bahasa Inggris: *Evaluation*) adalah proses penilaian. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya.

Dalam konteks ini terdapat lima variabel yang mendukung pelaksanaan sistem penyuluhan yakni: (1) ketersediaan lembaga penyuluhan, (2) pelaksanaan tugas dari setiap lembaga, (3) ketersediaan sumberdaya penyuluh, (4) ketersediaan programa penyuluhan, dan (5) fasilitas dan peralatan pendukung penyuluhan, variabel-variabel tersebut lebih mengacu pada landasan normatif yang tertuang dalam UU No. 16 tahun 2006 dan Pelpres no 154 tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan. ; pasal 8 ayat 2 huruf b; c; dan d UU no.16 tahun 2006 dan pasal 7; 12; dan 17 Pelpres No. 154 tahun 2014 masing-masing berkaitan dengan kelembagaan penyuluh pertanian pada tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. UU no.16 tahun 2006 pasal 11, 13, dan 15; serta pelpres No. 154 tahun 2014 pasal 9,12, dan 19 masing-masing berkaitan dengan tugas kelembagaan penyuluhan tingkat provinsi (Bakorluh), tingkat kabupaten (Bapeluh), dan tingkat kecamatan (BPP).

Keseluruhan indikator dan parameter dianalisis menggunakan sistem pemberian skor penilaian, yang kemudian diuraikan secara deskriptif. Penentuan skor tersebut menggunakan skala *Likert* dengan skala 1 sampai 3, atau diperbesar menjadi 100 – 300 agar pengukurannya lebih jelas. Skor terbesar adalah 300 untuk jawaban yang paling mendukung dan skor terendah adalah 100 untuk jawaban yang kurang mendukung. Maksud dari jawaban yang mendukung adalah adanya kesesuaian antara kondisi yang seharusnya (harapan) dengan kondisi yang terjadi (eksisting) pada poktan sampel.

Berdasarkan perolehan skor dari responden, selanjutnya ditentukan rentang skala atau selang untuk menentukan prestasi atau kinerja poktan. Selang diperoleh dari selisih total skor tertinggi yang mungkin dicapai dengan total skor minimal yang mungkin dibagi jumlah kategori jawaban (Umar 2005).

$$\text{Selang} = \frac{\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal}}{\text{jumlah kategori jawaban}}$$

Berdasarkan perolehan nilai selang yaitu 66, selanjutnya ditentukan skor kinerja dengan cara membagi tiga skor diantara total nilai minimal sampai total nilai maksimal hingga diperoleh tiga selang kinerja. Selang terendah (100 – 166) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem penyuluhan masih rendah/lemah, sementara selang tertinggi (234 – 300) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem penyuluhan tinggi/baik, sedangkan selang yang ditengah (167 – 233) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem penyuluhan cukup baik. Hasil perhitungan rentang skala dituangkan pada Tabel 1

Tabel 1 menunjukkan tiga katagori penilaian kinerja pelaksanaan sistem penyuluhan yakni kriteria A, B, dan C masing-masing diinterpretasikan sebagai kinerja yang baik, cukup baik, dan rendah/lemah.

Tabel 1. Skala Skor Penilaian pelaksanaan sistem penyuluhan

Kategori Penilaian Kinerja	Interpretasi	Rentang Skala	Tafsir Perkembangan Pelaksanaan sistem penyuluhan
A	Baik	234 – 300	Pelaksanaan sistem penyuluhan sudah didukung dengan ketersediaan lembaga, setiap lembaga sudah melaksanakan tugas, sumberdaya penyuluh, program penyuluhan dan fasilitas pendukung lainnya sudah tersedia
B	Cukup Baik	167 – 233	Sebagian besar kelembagaan penyuluhan sdh eksis dan aktif, tersedia sumberdaya penyuluh yang cukup, program penyuluhan sudah dibuat oleh sebagian besar lembaga penyuluhan, sudah dilaksanakan dgn baik, tersedianya fasilitas pendukung yang cukup
C	Rendah/lemah	100 – 166	Hanya sebagian kecil kelembagaan penyuluhan sdh eksis dan aktif, sumberdaya penyuluh masih kurang, hanya sebagian kecil lembaga yang sdh dan melaksanakan program penyuluhan, fasilitas pendukung masih kurang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Papua Barat

Kelembagaan penyuluh di provinsi Papua Barat, secara terstruktur berada pada tingkat Provinsi, tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. pada tingkat provinsi sudah terbentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BAKORLUH) yang dipimpin oleh kepala Badan dengan jabatan Struktural Eselon II (Perda No.36 tahun 2009). Pada tingkat kabupaten, pembentukan kelembagaan penyuluh dilakukan melalui perda (peraturan daerah) (Tabel 2). Sedangkan pada Tingkat kabupaten dan kecamatan hanya ada di kabupaten Manokwari (Tabel 3, dan Tabel 4)

Tabel 2. Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Tingkat Kabupaten Lingkup Provinsi Papua Barat tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Nama Lembaga Penyuluh	Dasar Hukum
1.	Kab. Manokwari	Kantor Penyuluhan Pertanian	Perda No.13 thn 2008
2	Teluk Bintuni	Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Perda No.4 thn 2008

3	Teluk Wondama	Bidang Penyuluhan	Perda No.13 thn 2007
4	Sorong	Kantor penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan	Perda No.1 thn 2014
5	Kota Sorong	Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	SK Walikota No.182.6/1011/2000
6	Sorong Selatan	Kantor Pelaksana penyuluhan dan Ketahanan Pangan	Perda no. 11 thn.2011
7	Raja Ampat	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Perda no. 7 thn 2013
8	Fakfak	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	-
9	Kaimana	Bidang Fungsional Dinas Pertanian dan Peternakan	Perda no.2 tahun 2007
10	Tambrau	Kantor penyuluhan dan ketahanan pangan	-
11.	Maybrat	Dinas Pertanian, Peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan	Perbup No.02 thn 2013

Sumber : Bakorluh Papua Barat, 2014. Diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten masih menempel pada Dinas Pertanian, dari 11 kabupaten yang diidentifikasi hanya kabupaten Fakfak, dan kabupaten Raja Ampat yang sudah membentuk kelembagaan mirip dengan yang diamanahkan pada Kepres 16 tahun 2016.

Selanjutnya kelembagaan penyuluhan ditingkat kecamatan yang disebut dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor penyuluhan Kabupaten (Kabupaten Manokwari), kelembagaan ini baru terbentuk di kabupaten Manokwari, di kabupaten lainnya belum terbentuk, namun demikian bangunan BPP sudah ada di beberapa kabupaten tetapi belum dimanfaatkan karena kelembagaannya belum terbentuk (Tabel 3).

Tabel 3. Banyaknya Bangunan BPP di Provinsi Papua Barat, Berdasarkan Kabupaten Kota Tahun 2014.

No	Kabupaten Kota	Banyaknya BPP	Keterangan
1	Kab. Manokwari	8	aktif
2	Teluk Bintuni	4	Kurang aktif
3	Teluk Wondama	9	Kurang aktif
4	Sorong	2	Tidak aktif
5	Kota Sorong	1	Tidak aktif
6	Sorong Selatan	0	-
7	Raja Ampat	1	Tidak aktif
8	Fakfak	3	Tidak aktif
9	Kaimana	9	Kurang aktif
10	Tambrau	1	Belum aktif
11	Maybrat	2	Belum aktif

Sumber Bakorluh 2014, diolah

Berdasarkan fakta di atas, pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat dipandang dari aspek kelembagaan dapat diidentifikasi bahwa kelembagaan yang sudah terbentuk dan berfungsi baru pada tingkat provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan pada tingkat kecamatan baru kelembagaan penyuluhan yang berkedudukan di kabupaten Manokwari yang sudah berfungsi, sedangkan kabupaten lainnya belum.

Penyuluh / Tenaga Penyuluh

Sesuai dengan ketersediaan lembaga yang ada, maka tenaga penyuluh yang ada di Papua Barat tersebar mulai yang berkantor di sekretariat bakorluh, kantor penyuluh kabupaten, sampai di tingkat kecamatan (penyuluh yang ada di BPP)

Tenaga Penyuluh yang ada di sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Badan koordinasi penyuluhan, hanya ada 10 orang. Berdasarkan pendidikannya meliputi D3 satu orang, D4/Si 9 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional, termasuk penyuluh Ahli, penyuluh pertanian Madya, dan Penyuluh Pertanian Muda. Melihat kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga penyuluh yang ada pada lembaga penyuluhan provinsi masih sangat kurang baik dari aspek kualitas, maupun kuantitasnya.

Kondisi kurangnya tenaga penyuluh pertanian, ternyata berlaku pula pada kelembagaan penyuluh di kabupaten, secara lengkap dituangkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Tenaga Penyuluh Pada Tingkat Kabupaten di Wilayah Papua Barat Berdasarkan Status Kepegawaian, tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Berdasarkan Status (Orang)			Jumlah (orang)
		PNS	THL-TBP/ Honor	Swadaya	
1	Kab. Manokwari	53	90	10	153
2	Kab. Sorong	93	10	14	114
3	Kota Sorong	18	7	2	27
4	Kab. Fakfak	44	8	0	52
5	Kab. Teluk Bintuni	22	8	46	76
6	Kab. Teluk Wondama	43	4	0	47
7	Kab. Kaimana	20	21	1	42
8	Kab. Sorong Selatan	3	5	0	8
9	Kab. Raja Ampat	13	2	0	15
10	Kab. Maybrat	1	0	0	1
11	Kab. Tambrau *)	3	0	0	3
12	Kab. Man- Sel*)	5	0	0	5
13	Kab. Peg. Arfak*)	3	0	0	3
	Rata-rata	24,7			
	Rata-rata Kec	14,6			
	Rasio peny/Kec	1,7			

Sumber: Bakorluh Papua Barat, 2014 diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara keseluruhan tenaga penyuluh yang ada di provinsi Papua Barat masih sangat kurang. Dalam satu kecamatan ahanya terdapat 1,7 penyuluh, padahal luas wilayah kerja penyuluhan pertanian (BPP) sekita 5 – 7 desa (kampung)

Tabel 4. Jumlah Tenaga Penyuluh di BPP Prafi, Sidey, Warmare, dan Oransbari Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2014

No	Jabatan Fung	Banyaknya Penyuluh pada masing-masing BPP			
		Prafi	Sidey	Warmare	Oransbari
1	Penyuluh Pertanian Madya	1	0	0	-
2	Penyuluh Pertanian Muda	1	1	0	1
3	Penyuluh Pertanian Penyelia	2	1	1	1
4	Penyuluh Pertanian Pertama	2	1	1	
5	Penyuluh Pertanian Pelaksana	3	4	0	2
5	Penyuluh Pemula	1	1	0	0
6	Penyuluh THL-TBP	1	0	10	9
	Jumlah Penyuluh	11	8	12	13
	Jumlah kampung	16	13	14	14
	Rasio penyuluh	0,68	0,61	0,85	0,91

Sumber: BPP Prafi, Sidey, Warmare, dan Oransbari, 2014, Diolah

Berdasarkan fakta - fakta di atas telah teridentifikasi bahwa jumlah penyuluh di Papua Barat masih sangat kurang, pada level kabupaten rasio penyuluh hanya 1,7 penyuluh per kecamatan, sedangkan pada level desa secara umum hanya 0,0.. per desa, kecuali khusus di kabupaten manokwari rasio penyuluh berkisar 0,61 – 0,91 per desa. Dengan demikian apabila cerminan diri berdasarkan keadaan ideal yaitu satu desa satu penyuluh maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat kurang ditunjang dengan ketersediaan penyuluh baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Programa Penyuluhan

Program penyuluhan pada tingkat provinsi (Kelembagaan Penyuluh tingkat provinsi) telah dibuat oleh Skretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat dalam bentuk buku dengan nama "programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan." Di dalamnya memuat bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan. Pada halaman pengesahan

ditandatangani oleh kepala sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan provinsi Papua Barat, kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan, kepala Dinas Kelutan dan Perikanan, kepala Dinas Kehutanan, kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, kepala Dinas Perkebunan masing-masing tingkat Provinsi Papua Barat.

Inti dari program penyuluhan dibuat dalam bentuk matrik program yang terbagi dalam lima kolom utama yakni: Kolom keadaan, tujuan, masalah, sasaran, dan kegiatan penyuluhan. Konten dari kolom keadaan menguraikan keadaan saat sekarang dari setiap bidang utamayang mengarah pada permasalahan. Pada kolom tujuan berisikan upaya peningkatan, baik produksi, PKS (pengetahuan, ketampilan, dan sikap), maupun penyelesaian/menekan terjadinya berbagai masalah. Pada kolom masalah berisikan pernyataan masalah yang telah diantar oleh kolom keadaan. Pada kolom sasaran berisikan pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas. Sedangkan pada kolom kegiatan penyuluhan berisikan materi, metoda, volume, lokasi, sumber biaya, pelaksana, dan penanggung jawab.

Programa Penyuluhan pada Tingkat Kabupaten berdasarkan sampel di tiga kabupaten (Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Sorong), ternyata hanya kelembagaan penyuluh (Kantor Penyuluhan) kabupaten Manokwari yang membuat programa sedangkan kabupaten lainnya belum membuat.

Di Kabupaten Manokwari dengan kelembagaan Kantor Penyuluhan, Programa Penyuluhan telah disusun dalam bentuk buku. Pada halaman pengesahan ditandatangani oleh kepala Kantor Penyuluhan, Kepala Distrik Kepala Dinas terkait, ketua KTNA kabupaten, Penyuluh senior. Isi buku disusun berdasarkan tahapan, yang dimulai dengan Keadaan saat ini, Tujuan Kegiatan, Masalah, dan cara mencapai Tujuan. Muatan programa ini terintegrasi dengan intitusi terkait, dan sejalan dengan Program yang dibuat oleh kelembagaan penyuluh tingkat provinsi.

Matrik Program terdiri dari 5 bagian utama, yakni Kolom Keadaan, Tujuan, Masalah, Sasaran, dan kegiatan penyuluhan. Pada kolom sasaran tertulis Pelaku utama, pelaku usaha, dan petugas. Sedangkan kolom kegiatan penyuluhan terdiri dari: Materi, kegiatan/metoda, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, penanggung jawab, dan pelaksana.

Programa penyuluhan tersebut dibuat juga oleh 4 BPP yang menjadi sampel dalam pelaksanaan FGD, yaitu BPP Prafi, BPP Sidey, BPP Warmare, dan BPP Oransbari. Formatnya sama seperti sebagai berikut:

Programa Penyuluhan disusun dalam bentuk buku. Pada halaman pengesahan ditandatangani oleh kepala BPP, Kepala Distrik (Kecamatan), ketua KTNA distrik, Penyuluh senior, dan diketahui oleh Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian Kabupaten Manokwari. Isi buku disusun berdasarkan tahapan, yang dimulai dengan Analisis Keadaan (AK), Tujuan Kegiatan (TK), Masalah, Cara mencapai Tujuan dalam bentuk matrik Program Penyuluhan. Matrik program yang dibuat di BPP modelnya sama dengan pada tingkat kabupaten, hanya lingkup kegiatannya lebih kecil.

Berdasarkan fakta- fakta di atas telah teridentifikasi bahwa program penyuluhan hanya dibuat pada level kelembagaan penyuluh tingkat provinsi (Bakorluh), sedangkan pada kelembagaan penyuluh tingkat kabupaten dan kecamatan tidak dibuat kecuali kabupaten Manokwari dan seluruh BPP yang ada di kecamatan lingkup kabupaten Manokwari.

Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan ditingkat lapangan yaitu pada wilayah kerja penyuluhan pertanian (WKPP) oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada umumnya dilakukan oleh penyuluh. Pendekatan penyuluhan masih menggunakan sistem "LAKU" (latihan dan kunjungan) tetapi kegiatan pelatihannya jarang dilakukan. Mereka pada umumnya melakukan kegiatan kunjungan dan pertemuan.

Dalam kegiatan kunjungan terhadap masyarakat pendatang (transmigrasi) biasanya dilakukan baik di lapangan maupun dirumah, sedangkan pada masyarakat lokal lebih sering berkunjung di lapangan (kebun). Kegiatan pertemuan biasanya dilakukan jika ada program masuk di WKPP, jika tidak

ada program hampir tidak pernah dilakukan pertemuan terutama pada masyarakat lokal. Masyarakat pendatang sudah melakukan pertemuan kelompok secara rutin paling tidak sebulan sekali biasanya dirangkaikan dengan acara arisan atau pengajian.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sangat terasa bahwa tenaga penyuluh lapangan masih kurang, beberapa penyuluh terpaksa merangkap lebih dari satu desa. Sebagai contoh di BPP prafi meliputi 17 kampung/desa sedang jumlah penyuluh hanya 11 orang termasuk penyuluh THL-TBP. BPP Sidey luas wilayah kerja meliputi 13 kampung, sedangkan jumlah penyuluh hanya 10 orang termasuk THL-TBP. Demikian juga BPP Warmare hanya 12 orang termasuk penyuluh THL-TBP 10 orang. Sedangkan luas wilayah kerjanya meliputi 24 kampung.

Selain tenaga penyuluh materi penyuluhan dan dukungan peralatan juga dirasakan belum memadai. Pada umumnya penyuluh yang ada di wilayah kabupaten Manokwari melaksanakan penyuluhan mengacu pada program penyuluhan yang sudah dibuat, mereka juga mengakui mendapat materi dari majalah Sinar Tani dan dari BPTP Papua Barat. Penyuluh yang ada di luar wilayah kabupaten Manokwari melaksanakan penyuluhan berdasarkan pengalaman yang telah mereka miliki, tanpa membuat program penyuluhan secara tertulis.

Beberapa permasalahan yang sempat dikekmukakan oleh penyuluh antara lain : Biaya operasional tidak ada, hanya mengandalkan biaya yang menempel di gaji; sarana lapangan masih kurang seperti: Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), PUTK, tester, dan alat ukur lainnya; kredit poin susah diperoleh (terutama bagi penyuluh madya ke atas).

Evaluasi Pelaksanaan sistem Penyuluhan di Papua Barat

Hasil Evaluasi pelaksanaan sistem penyuluhan menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat masih rendah (Tabel 5)

Tabel 5. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyuluhan di Papua Barat Tahun 2014

No	Variabel yang dinilai	Nilai	Kriteria	Interpretasi
1	Keberadaan Lembaga	120	C	Rendah/lemah
2	Pelaksanaan Tugas setiap lembaga	140	C	Rendah/lemah
3	Ketersediaan penyuluh	130	C	Rendah/lemah
4	Ketersediaan dan pelaksanaan program penyuluhan	120	C	Rendah/lemah
5	Dukungan fasilitas dan peralatan	120	C	Rendah/lemah
	Rata-rata	126	C	Rendah/lemah

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari lima kriteria yang dinilai yakni: Keberadaan Lembaga, Pelaksanaan Tugas setiap lembaga, Ketersediaan penyuluh, Ketersediaan dan pelaksanaan program penyuluhan, serta Dukungan fasilitas dan peralatan seluruhnya berada pada kriteria "C" yang artinya rendah/lemah. Dari kelima variabel penentu tersebut hanya pelaksanaan tugas setiap lembaga yang memiliki skor tertinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa para penyuluh dimanapun berada tetap melaksanakan penyuluhan, artinya walaupun lembaganya belum terbentuk kegiatan penyuluh tetap ada, hanya tidak fokus pada kegiatan penyuluhan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat bukan semata-mata disebabkan oleh faktor penyuluhnya, tetapi lebih menunjuk pada variabel-variabel yang berada di luar kemampuan penyuluh itu sendiri. Lebih tegasnya perlu diselesaikan oleh penentu kebijakan di tingkat kabupaten kota. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jamil at al, (2013) yang salahsatunya menegaskan bahwa untuk mengembangkan kelembagaan penyuluhan pertanian agar lebih eksis sesuai UU no.16 tahun 2006 diperlukan perbup/perwali disertai dengan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat lima variabel yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sistem penyuluhan di Papua Barat sesuai UU No.16 tahun 2006 dan Pelpres no 154 tahun

2014. Kelima variabel tersebut adalah (1) keberadaan kelembagaan penyuluhan, (2) pelaksanaan tugas setiap lembaga, (3) ketersediaan penyuluh, (4) ketersediaan dan pelaksanaan program penyuluhan, (5) dukungan fasilitas dan peralatan. Pelaksanaan sistem penyuluhan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat saat ini masih sangat lemah. Hal ini bukan semata-mata disebabkan oleh faktor penyuluhnya, tetapi lebih menunjuk pada variabel-variabel yang berada di luar kemampuan penyuluh itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakorluh provinsi Papua Barat, 2014. Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
- Bappeda Prov. Papua Barat, 2012. Arah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di Provinsi Papua Barat. Prosiding Seminar Nasional Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berbasis Inovasi. Manokwari.
- Curtis, Dan B; Floyd, James J.; Winsor, Jerryl L. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1996. Hal 414
- Duncan, Tom. 2005. *Principles of Advertising & IMC. Second Edition*. Mc.Graw-Hill. Bab 22.
- Fatah Lutfi, 2010. Simple manual For Outcome Based Monitoring and Evaluation. Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat.
- Jamil, Muh Hatta, Anwar Sulili, A. Amirullah . 2013. Kajian Strategi Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan. <http://respository.unhas.ac.id>.
- Peraturan Presiden No. 154. Tahun 2014. Tentang Kelembagaan Penyuluhan. Sekretariat Negara RI tahun 2014.
- Umar, Husein. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 99-102.
- Slamet Margono, 2006. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di era otonomi daerah. Makalah, disajikan pada Pelatihan Penyuluh Pertanian di Universitas Andalas. Tahun 2006.
- Undang-Undang No.16, Tahun 2006. Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Sekretariat Negara RI, 2006. Sitorus, MT, Endriatmo, S, Juara P.L, Ivanovich A, dan Rahmat P. 2004. Agribisnis Berwawasan Komunitas. Sinergi Modal Ekonomi dan Modal Sosial. Pustaka Wira Usaha Media. Bogor.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Balai Pustaka.